BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Kusumohamidjojo, dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hokum merupakan dua aspek yang dominan. Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (*interst)* (Sitepu, 2011: 20).

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas Negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan ini dapat berjalan baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau Negara, yang melakukan interaksi baik secara

resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau Negara lain.

Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat mengunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan atau interaksi yang melintasi batas Negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional (Rudy, 1993:3)

Studi hubungan internasional menurut McCelland dalam Perwita & Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang kadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumberdaya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (2005: 4)

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu Negara. Namun pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasioanal adalah mempelajari perilaku

internasional, yaitu perilaku aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Hubungan internasional merupakan interaksi antar dua aktor yang tindakannya memiliki konsekuensi penting terhadap faktor lain dari luar jurisdiksi efektif unit positif nya (Perwita dan Yani, 2005: 7).

Menurut Schwarzenberger dalam bukunya "*power policy*" ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (Schwarzenbeger, 1964:8). Stanley Hoffman dalam bukunya "*contemporary theory in internasional relation"* mengartikan hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama dalam memperhatikan hubungan antar negara (1960: 6).

Pada dekade 1980-an studi hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara Negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan Negara yang perilakunya juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan Negara bangsa artinya ilmu hubungan internasional mangacu pada segala aspek bentuk interaksi yang melampaui batas-batas Negara (Perwita & Yani,2005: 3).

2.2 Konsep Hubungan Luar Negeri

Interaksi antar aktor dalam studi hubungan internasional bisa berbentuk hubungan bilateral, dan multilateral. Perwita berpendapat bahwa interaksi dapat dibedakan berdasarkan atas:

Berdasarkan banyak pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangan *(recurrent)* sehingga membentuk suatu pola tertentu, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain debedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Bentuk-bentuk interaksi inilah yang disebut dengan hubungan luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik diantara dua pihak. Hubungan luar negeri ini meliputi interaksi yang menggambarkan suatu pola hubungan aksi dan reaksi. Adapun hubungan aksi dan reaksi ini melalui proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari Negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di Negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari Negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari Negara pemrakarsa. (Perwita, 2005: 42).

2.3 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan

antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill)*.

"Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan *alternative* pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak.

Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Seperti perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan kerjasama antara kedua Negara diekspresikan melalui penandatanganan suatau "Perjanjian Persahabatan" sebagai perwujudan *ukhuwah Islamiyah* (http://www.

aksesdeplu. com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI. htm, diakses tanggal 12 Februari 2011)

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara Negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita dan Yani, 2005 : 42).

2.4 Tenaga Kerja

Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut :

> "Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" (Tunggul, 2009: 18).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Undang -Undang No.13 Tahun 2003).

Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh, karyawan, dan pegawai (Sastrohadiwiryo, 2003 : 27).

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 UU nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, adalah :

> "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah"(UU No. 39 Tahun 2004).

2.5 Buruh Migran

Dalam era globalisasi saat ini, daya serap tenaga kerja tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga hingga keluar negeri. Para pekerja yang datang untuk mencari kerja diluar negeri ini disebut sebagai buruh migrant. Lebih jelas di definisikan menurut konvensi internasional tahun 1990 sebagai berikut :

"bahwa istilah buruh migran adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana dia bukan menjadi warga negara" (http://www.workersconnection.org/articles.php?more=123, diakses tanggal 17-07-2012).

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisas

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_35.htm diakses tanggal 17-07-2012).

Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri atau lebih dikenal dengan buruh migran terikat dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja (Sumiyati, 2009: 31).

Pengertian buruh migran Indonesia atau TKI lebih jelas dikatakan bahwa adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI (Afandi, 2004: 11).

2.6 Politik Luar Negeri

2.6.1 Definisi Politik Luar Negeri

Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah, '*action theory*', atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu Secara teori politik luar negeri adalah adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan Negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu Negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan Negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi atau aktor yang ada diluar batas-batas wilayah Negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi

utama dari pelaku Negara dalam hubungannya dengan Negara lain, sehingga yang terjadi adalah interaksi negra-negara (Sitepu, 2011: 178)

Ini adalah suatu proses yakni suatu proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan atau mengartikulasikan kebijaksanan yang pada prinsipnya dipengaruhi oleh suasana dalam negeri (*domestic*) dan suasana internasional dan kesemuanya ini diarahkan pada tujuan atau sasaran politik luar negeri itu sendiri, didasarkan pada dua unsur utama yaitu :

1. Tujuan nasional (*national objective*); dan
2. Sarana (*means*) untuk mencapai tujuan (Sitepu, 2011: 179).

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

Pendapat C.D.F. Luhulima sejalan dengan pendapat Mohtar Mas ′ oed dalam Sidik Jatmika (2000 : 152) kajian mengenai Teori Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian kelebihan sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil).

2.6.2 Kebijakan Luar Negeri

Tindakan-tindakan eksternal Negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatu Negara dikonsepsikan kedalam beberapa kategorisasi. Rosenau dalam Perwita & Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri kedalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperngkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu berisikan seperngkat nilai-nilai ideal kebijakan

luar negeri suatu Negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negerinegara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (*as a set commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu Negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu Negara dalam situasi tertentu (2005: 53-55).

2.7 Diplomasi

Berdasarkan kamus *Oxford*, diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau tawar menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat untuk melaksanakan politik luar negeri. Lester Pearson pernah berkata bahwa: "diplomasi tidak merumuskan kebijaksanaan, tetapi menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan itu dan mencoba merundingkan pengaturan- pengaturan baru". Diplomasi, menurut A.M. Taylor, mencerminkan suatu upaya membuat "kebajikan dari suatu keterpaksaan" .

Untuk melakukan diplomasi dibutuhkan seorang diplomat, adapun fungsi dari seorang diplomat antara lain:

1. Representasi, mewakili negara pengirim di negara penerima.
2. Proteksi, melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional .
3. Negosiasi, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima.
4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim.

5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara dua negara serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan (http://www.deplu.go.id/dubai/Pages/Divisions.aspx?IDP=1&l=id).

Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.

2.8 Konsep *Idiosyncratic*

2.8.1 Definisi *Idiosyncratic*

Idiosyncratic senantiasa berkaitan dengan persepsi, *image* dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan politik luar negeri, antara lain terlihat dalam kondisi-kondisi seperti, ketenangan versus tergesa-gesa; kemarahan versus prudensi; pragmatis versus ideologi yang bersifat pembasmian atau pemberantasan; ketakutan versus sikap percaya diri yang berlebihan; keunggulan versus keterbelakangan; kreativitas versus penghancuran.

Dalam hubungan internasional individu memiliki peranan yang signifikan, dimana dalam studi hubungan internasional teoritis memperlihatkan perilaku individu, karena individu sebagai salah satu pembuat keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi untuk menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung. Maka faktor individu ini akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri dalam suatu Negara.

Dan untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam *decision making process* pada akhirnya memunculkan istilah *idiosyncratic* dalam politik luar negeri. *Idiosyncratic* mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Secara umum *idiosyncratic* adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukannya.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri *idiosyncratic* merupakan salah satu faktor penentu dalam keberadaan politik luar negeri tersebut (Rosenau, 1976 : 15).

Sedangkan *idiosyncratic* menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Kartini, 1974 : 74). Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

Columbis dan Wolf mendefinisikan faktor *idiosyncratic* sebagai suatu variabel yang berkaitan dengan persepsi. Yaitu, proses yang tidak dapat dipisahkan dari individu dalam mengambil keputusan. Individu akan selalu

bertindak menggunakan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk memahami lingkungan disekitarnya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa individu akan selalu membangun suatu gambaran psikologis (*image*) akan dunia. Gambaran inilah yang nantinya akan memberi masukan pada individu tersebut untuk menginterpretasikan lingkungan yang lebih kompleks (mas'oed, 1990: 19).

Persepsi dan interpretasi merupakan suatu proses yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Seorang individu akan selalu mempertimbangkan keduanya sebelum melakukan tindakan. Hal ini didasari pada anggapan bahwa seorang individual akan membangun suatu gambaran psikologis akan lingkungan sekitarnya bahkan dunia. Gambaran yang terbentuk inilah yang akan memberi masukan dalam interpretasinya terhadap permasalahan yang lebih kompleks. Dengan sendirinya peran persepsi dan interpretasi sangat krusial dalam proses pembuatan keputusan seorang pemimpin (Karen Mingst, 1999:45).

Hubungan antara persepsi dan proses pembuatan politik luar negeri dijelaskan oleh Ole Holsti. Dalam proses yang digambarkan oleh Holsti, input yang berupa informasi diolah berdasarkan fakta dan nilai oleh para pembuat keputusan yang kemudian dapat langsung dihasilkan output berupa keputusan, namun dapat juga keputusan yang dihasilkan mendapat sentuhan persepsi dari si pembuat keputusan.

2.8.2 *Idiosyncratic* Dalam Politik Luar Negeri

Rosenau merupakan tokoh politik yang mencoba lebih disiplin dalam membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis dan para

analis dikehendaki untuk mamfokuskan saja pada satu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Secara umum dikatakannya bahwa dalam berbagai kajian politik luar negeri ada lima variabel utama yaitu idiosinkrasi (*idiosyncratic*), peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemik.

Berikut adalah table pre-teori yang berisi urutan-urutan faktor yang paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan luar negeri suatu negara berdasarkan posisi geografis dan kekuatan negara. Sistem ekonomi dan pemerintahan negara tersebut.

Tabel 2.1

Pre-Teori Dan Teori Rosenau

Geography And Physicial Sources	Large Country				Small Country			
State Of The Economy	Developed		Undeveloped		Developed		Undeveloped	
State Of The Polity	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed
Rankings Of The Variable	Role Societal Governmental Systemic Idiosyncratic	Role Societal Governmental Systemic Societal	Idiosyncratic Role Societal Systemic Governmental	Idiosyncratic Role Governmental Systemic Societal	Role Systemic Societal Governmental Idiosyncratic	Role Systemic Idiosyncratic Governmental Societal	Idiosyncratic Systemic Role Societal Governmental	Idiosyncratic Systemic Role Governmental Societal
Illustrative Example	Us	Soviet Union	India	China	Holland	Czecho-Slovakia	Kenya	Ghana

Sumber : (Hara, 2011 :92).

Rosenau menyebut set tiap-tiap variabel diatas sebagai pre-teori karena sulitnya menentukan set variabel mana yang paling besar porsinya. Pada level pre-teori, Rosenau mengatakan bahwa cukup dilihat potensi relatif dari variabel yang paling berpengaruh dalam pembuatan keputusan luar negeri. Variabel mana yang relatif penting menurut pre-teorinya Rosenau bergantung pada kondisi negara itu sendiri apakah besar atau kecil, dan bergantung juga pada kemajuan ekonomi dan sistem pemerintahan negara tersebut.

Dalam perkembangan kajian saintifik studi hubungan internasional, variabel-variabel yang disebut Rosenau ini sering dijadikan level analisis tersendiri yang terpisah satu sama lain. Misalnya, hanya melihat satu aspek saja seperti idiosinkrasi Soekarno atau Mahatir saja tanpa melihat sejauh mana porsi factor itu dalam perumusan politik luar negeri suatu negara. Tujuan Rosenau untuk membuat generalisasi proporsi faktor-faktor yang paling berpengaruh dengan urutan yang jelas dalam politik luar negeri pada tiap-tiap negara nampaknya sulit diwujudkan karena dalam setiap isu dan konteks, factor yang paling berpengaruh selalu berbeda satu sama lain (Hara,2011 : 89-92).

2.8.3 Karakteristik Kepribadian Dalam Politik Luar Negeri

Untuk mempelajari *idiosyncratic* maka perlu dipelajari kepribadian seseorang tersebut. Kepribadian seseorang sering kali diklasifikasikan menjadi tipe pribadi yang tertutup dan pribadi yang terbuka. Disisi lain terdapat pula pengklasifikasian kepribadian berdasarkan tinggi rendahnya karakter dominasi seseorang. Oleh Etheredge kedua klasifikasi tersebut dihubungkan sehingga dapat

ditemukan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi politik luar negeri yaitu sebagai berikut :

1. *Black leaders*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan sangat mendominasi. Individu memiliki ciri ulet dan mendominasi pada satu sentral.

2. *World leaders*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan sangat mendominasi. Ciri-ciri dari pemimpin ini adalah kecenderungan mempergunakan kekuatan militer, fleksibel, dan pragmatis.

3. *Maintainers*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang tertutup dan kurang mendominasi. Memiliki kecenderungan untuk mempertahankan *status quo.*

4. *Conciliators*

   Merupakan gabungan antara kepribadian yang terbuka dan kurang mendominasi. Bercirikan penolong dan kurang konsisten (Hopple: 78-79).

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Berdasarkan kerangka yang di uraikan, maka Hermann dan Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu:

1. *Ekspansionist*

   Individu tidak ingin kehilangan kontrol. Mempunyai keinginan untuk memiliki control yang besar (*high need for power*), memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan (*low conceptual complexity*) dan mempunyai ketidak percayaan terhadap orang lain (*high distrust of others*). Namun individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan intergrasi Negara (*high nasionalism*). Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan *(low need for affiliation)* dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (*high believe in control over events*). Tipe *expansionist* ini menggunakan agresifitas dalam mewujudkan tujuannya.

2. *Active independent*

   Individu semacam ini memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan Negara-negara lain. Individu akan berusaha mempertahankan kebebasan berusaha untuk menggalang hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri individu yang masuk golongan ini adalah *High nasionalism, High conceptual complexity, High believe in own control, high need of affiliation, low distrus to others, low need for power.*

3. *Influential*

   Individu berusaha menjadi pusat dari lingkungan, mempunyai kehendak dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Negara lain. Pemimpin dengan karakter seperti ini akan menciptakan bahwa tujuannya adalah yang paling penting dibandingkan yang lain. Pemimpin Negara akan besikap protektif dengan Negara-negara yang menentangnya. Ciri-cirinya adalah, *High nasionalism, Low conceptual complexity, High believe in own control, Low need of affiliation, High distrus to others, High need for power*.

4. *Mediator*

   Karakter inidividu ini sering menyatukan perbedaan diantara Negara dan memainkan peran "*go-between*". Pemimpin mendapatkan Negara-negara sebagai perwujudan perdamaina dunia dan selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrus of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power*. Pada umumnya pemimpin seperti ini senang berada dibelakang layar. Meskipun memberikan implikasi kepada Negara lain namun menghindari intervensi.

5. *Opportunist*

   Seseorang yang berusaha tampil bijaksana, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan apa yang ia anggap perlu dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Cirri-cirinya adalah,

Low nasionalism, High conceptual complexity, Low believe in own control, Low need of affiliation, Low distrus to others, Low need for power.

6. *Participative*

   Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan sebuah Negara dalam arena internasional. Individu seperti ini tertarik untuk mencari yang berharga untuk Negara dan mencari alternative solusi dari permasalahan yang dihadapi Negara atau Negara lain. Ciri-cirinya adalah, *Low nasionalism, High conceptual complexity, Low believe in own control over events, High need of affiliation, Low distrus to others, Low need for power* (Falkowski, 1979: 20)

Definisi karakter kepribadian lebih lanjut dijelaskan oleh hermann dan falkowski sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penjelasan Indikator Umum dari Kepribadian Politik

INDIKATOR UMUM DARI KEPRIBADIAN POLITIK	DEFINISI
High nasionalism	Individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara
High believe in own control	memiliki tingkat inisiatif yang tinggi
High need for affiliation	Individu mementingkan arti hubungan pertemanan
High conceptual complexity	Memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyadari adanya beberapa

	alternatif pilihan pembuatan keputusan
High distrust of others	Mempunyai ketidak percayaan terhadap orang lain
High need for power	Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar
Low nasionalism	Mempunyai kehendak yang rendah dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara
Low conceptual complexity	Memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan
Low believe in own control	Memiliki tingkat inisiatif yang rendah
Low need for affiliation	Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan
Low distrust of others	Memilki kepercayaan rendah terhadap orang lain
Low need for power	Mempunyai keinginan untuk memilki kontrol yang rendah

(Sumber : Falkowski, 1979: 20)

Dari penjelasan tipe kepribadian diatas dapat menjelaskan Definisi karakter kepribadian *active independent* sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penjelasan Dari Indikator Tipe Kepribadian *Active Independent*

Indikator umum dari kepribadian *Active Independent*	**Definisi**
High nasionalisme	Individu yang berkarakter nasionalis, mempunyai kehendak yang kuat dalam

	memelihara kedaulatan dan integrasi Negara.
High believe in own control	Memiliki tingkat inisiatif yang tinggi.
High need for affiliation	Individu yang mementingkan arti hubungan pertemanan.
High conceptual complexity	Memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan.
Low distrust of others	Lemahnya ketidak percayaan terhadap orang lain.
Low need for power	Lemahnya keinginan untuk memiliki kontrol yang besar.

(Sumber: Falkowski, 1979 : 20).

Setiap individu akan dapat menghasilkan suatu keputusan yang berbeda walaupun diahadapi dengan permasalahan yang sama, oleh karena itu setiap individu juga dapat memiliki karakter kepribadian yang berbeda pula.